

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA FIRMWARE YANG TERDAPAT DALAM MODEM YANG DI UNLOCK (Studi Kasus Pelaporan PT Internux Terhadap Toko Cumi Laut Software Development Yang Memberikan Jasa *Unlock Modem*)

INTISARI

Oleh :

M. Rizky Wahidin¹, M. Hawin²

Terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta diantaranya adalah merusak atau membuat tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum hak cipta yang mengatur dapat mencakupi untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta pada *firmware* dan untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta pada *firmware* berdasarkan studi kasus yang diangkat oleh penulis.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode normatif-deskriptif dengan menggunakan penelusuran kepustakaan melalui data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bentuk yang digunakan dalam penelitian diwujudkan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan dan menguji kaidah-kaidah hukum yang sudah ada.

Berdasarkan penelitian terhadap permasalahan, ketentuan hukum yang mengatur perlindungan Hak Cipta khususnya hak eksklusif pencipta yang menyangkut hak moral dan hak ekonomi sudah cukup diatur apabila dibandingkan dengan pengaturan Hak Cipta sebelumnya. Perlindungan terhadap pencipta/ pemegang hak cipta digolongkan menjadi perlindungan preventif untuk mencegah suatu pelanggaran dan perlindungan represif setelah ada pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta. Wahyu Wibowo terbukti dengan sengaja merusak dan membuat tidak berfungsi *firmware* yang hak ciptanya dimiliki oleh PT Internux dan melanggar ketentuan dalam Pasal 112 jo Pasal 52 dan Pasal 113 ayat (3) UUHC berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 416/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT Tanggal 6 Agustus 2015.

Kata Kunci : Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Cipta, *Unlocking Firmware*, Hak Moral dan Hak Ekonomi

¹ PT UPC Renewables Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

**ANALISIS OF COPYRIGHT PROTECTION ON THE FIRMWARE
CONTAINED ON UNLOCKED MODEM
(Case Studies of reporting of PT Internux against Cumi Laut Software
Development Store that provide service to unlock modem)**

ABSTRACT

By :

M. Rizky Wahidin¹, M. Hawin²

There are various issue relating to infringement of Copyright which are damaging or make malfunction of control technology means is used as a protector of creation. This study aims to identify and analyze the legal provision governing copyright can cover to protect the moral and economic right of copyright holders in the firmware and to analyze the implementation of the legal protection of the right of moral and economic right of copyright holders in the firmware based on case studies raised by the author.

The research method that author use is the normative-descriptive method using literature search through secondary data obtained from the primary, secondary, and tertiary legal material. The form used is the research is realized in the form of descriptive to describe and examine the legal rules that already exist.

Based in a study of the issue, the legal provision governing the protection of copyright especially regarding exclusive right concerning moral and economic right are already sufficiently regulated compared with earlier regulation. Protection of the creator/ copyright holder are classified into preventive protection to prevent an infringement and repressive protection after the violations committed. Wahyu Wibowo proved to deliberately undermine and create the firmware does not work whose copyright is owned by PT Internux and violated the provision of Article 112 jo Article 55 and Article 113 paragraph (3) UUHC by West Jakarta District Court Decree No 426/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT dated August 6th, 2015.

Key word : Intellectual Property Right (IPR), Copyright, Unlocking Firmware,
Moral and Economic Right

¹ PT UPC Renewables Indonesia

² Faculty of Law Gajah Mada University Yogyakarta